



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **SKRIPSI**



**EDO RYOMA**  
**0910532100**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2015**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **Edo Ryoma**  
No. BP : 0910532100  
Program Studi : Strata Satu (S-1)  
Jurusan : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja  
Pemerintahan Kabupaten Di Provinsi Sumatera Barat**

Telah disajikan dan disetujui skripsi ini melalui seminar hasil yang diadakan pada tanggal 17 Juni 2015 sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

Padang, 17 Juni 2015

Kepala Program Studi Akuntansi



**Verni Juita, SE, Mcom (Adv), Ak**  
**NIP. 1979061820021222004**

Pembimbing Skripsi



**Dr. Asniati, SE, MBA, Ak, CSRS, CSRA**  
**NIP. 196508071991032002**



	No Alumni Universitas	EDO RYOMA	No Alumni Fakultas
	<p style="text-align: center;"><b>BIODATA</b></p> <p>a). Tempat/Tgl Lahir: Kanazawa/ 17 November 1991 b). Nama Orang Tua : Zulkarnain edward c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 0910532100 f). Tanggal Lulus : 27 juli 2015 g). Predikat lulus : Memuaskan h). IPK : 3,06 i). Lama Studi : 5 Tahun 11 Bulan j). Alamat Orang Tua: Jln.Gunung Singgalang IV no.5 Gunung Pangilun Padang.</p>		

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat

Skripsi Oleh Edo Ryoma

Pembimbing Dr. Asniati, SE, MBA, Ak, CSRS, CSRA

### ABSTRACT

This research aims to understand and analyze the influence of district taxes , retribution, the result of the regional wealth management, other legal income, and the Net District Income against financial performance of the district governmental in west sumatra for the years 2008-2012 . Lower of PAD (Net District Income) means that lower percentage to finance development services , and vice versa. Higher PAD means that higher percentage to finance the development services

In this research there are 12 districts in west sumatra which consists of 60 sample of data using purposive sampling method. The hypothesis testing in this research is multiple linear regression analysis.

Based on the test, it was obtained simultantly, genuine local income had effect towards the monetary of local and district government of West Sumatera province, and they are only retribution, the result of the regional wealth management, other legal income which dominantly affect the performance of district government monetary of West Sumatera

**Keywords:** Net District Income (PAD), which includes of District Taxes, Retribution, The Result of The Regional Wealth Management, and Other Legal Income

### ABSTRAK



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisa pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Pendapatan Lain-lain yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2008-2012. Bila PAD suatu daerah itu rendah maka persentase PAD untuk membiayai pelayanan Pembangunan rendah dan sebaliknya, jika PAD suatu Daerah itu tinggi maka persentase PAD untuk membiayai pelayanan pembangunan itu tinggi.

Dalam penelitian ini terdapat 12 Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah data 60 sebagai sample melalui purposive sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda.

Berdasarkan pengujian diketahui bahwa terdapat pengaruh PAD secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Dan secara parsial hanya retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain lain yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 17 Juni 2015, dengan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
	Nama Terang Rahmat Kurniawan, SE, M.Si, Ak	Dr. Asniati, SE, MBA, Ak, CSRS, CSRA

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi:

Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Ak  
NIP. 197205021996021001

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan skripsi dengan judul :

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan**

**Pemerintahan Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat**

merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika, dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 4 Agustus 2015

Yang Memberi Pernyataan



**Edo Ryoma**

No. BP : 0910532100

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai, membimbing, memberikan kesehatan, kekuatan, ketenangan, dan kemudahan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Di Provinsi Sumatera Barat”** ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah terlibat dan berkontribusi memberikan bantuan, nasehat dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini maupun selama penulis mengikuti pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Zulkarnain Edward dan Merry Effy, beribu terima kasih karna telah menjadi orang tua terbaik bagi penulis sedari kecil hingga sampai pada saat sekarang ini. Karna cinta kasih sayang, perlindungan, perhatian, dukungan, nasehat, bimbingan, dan do'a dari kedua orang tua lah penulis bisa berhasil menyelesaikan segala hal yang terlihat sulit. Apapun yang telah penulis raih akan dipersembahkan untuk



kedua orang tua tercinta. Dan tak lupa pula terima kasih penulis ucapkan untuk kedua uda uda yang selalu menyemangati penulis juga seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

2. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Firdaus SE, M.Si, Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Ibu Dr. Asniati, SE, MBA, Ak, CSRS, CSRA, selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing serta selalu meluangkan waktu untuk memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rahmat Kurniawan, SE, M.Si, Ak, selaku penelaah skripsi yang telah memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi sehingga menjadi lebih baik.
6. Bapak Drs. Suhandi, SE, M.Si, Akt, selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan masukan, nasehat, dan bimbingan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
7. Bapak Dr. Suhairi, SE, M.Si, Akt, Ibu Dra. Nini Syofriyeni, M.si, Ak, selaku penguji ujian komprehensif yang telah bnyak sekali memberikan masukan yang membuat penulis menyadari masih banyak kekurangan yang dimiliki baik dalam ilmu pengetahuan juga ajaran Agama dan akan terus berusaha dan belajar agar dapat menutupi segala kekurangan tersebut.
8. Seluruh Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan dari awal hingga akhir, serta kepada

pegawai biro akuntansi Da Ri dan Ni Epa yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan masalah masalah akademik, seperti ibarat jantung dalam biro akuntansi,serta pegawai ICT dan dekanat yang bisa bersahabat dalam membantu segala urusan perkuliahan.

9. Untuk Seseorang yang setia dan selalu sabar mendampingi, menyemangati, mengingatkan, dan menemani penulis. Selalu berbagi, saling belajar dan mengajarkan dalam berbagai hal , juga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah penulis. Banyak terima kasih yang ingin diucapkan, semoga semua ucapan bisa diutarakan lewat sebuah pencapaian. Seseorang terbaik yang pernah penulis miliki, *bless the food before us, the family beside us, and the love between us...hehe*, Suci Actriani, SH, CLA.
10. Sohib sohib dan brother seperjuangan, ocky asmirandah gorengan dan adi bogel rebel yang ngedance layaknya agnes monica, yang mengingatkan dan memberi masukan meskipun jarang, dan hal hal lain yang ada di dalam sebuah persahabatan. Untuk bro ponti, itom, bayu, surip, hanif, ajo, windi merdesa store, edo kecil, aditia debo, putra kiting, bg jay, yudha, angga martha kawan kompre seperjuangan yang saling menyemangati layaknya saudara, kawan kawan pecinta olahraga futsal, basket dan bulutangkis, juga untuk seluruh teman teman Akuntansi, terlebih kelas A3 yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu. Semoga persahabatan dan pertemanan ini tidak hanya untuk sementara dan tali persaudaraan ini tetap kuat hingga akhir, kita berjuang bersama dan sukses bersama, Amin..



Penulis berharap segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini akan dibalas oleh ALLAH SWT. Penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu semua pihak.

Padang, 4 Agustus 2015

Penulis,



Edo Ryoma  
0910532100

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	i
ABSTRAK .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Batasan Masalah .....	5
1.4. Tujuan Penelitian .....	5
1.5. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1. Pengertian Otonomi Daerah .....	7
2.2. Tujuan Otonomi Daerah .....	9
2.3. Pendapatan Asli Daerah .....	10
2.3.1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah .....	11
2.3.2. Pajak .....	13
2.3.3. Jenis-jenis Pajak Daerah Pajak .....	14
2.3.4. Manfaat Pajak .....	16
2.4. Teori Anggaran .....	17
2.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	18
2.6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	19
2.7. Pengukuran Kinerja dan Peningkatan Kinerja .....	20
2.8. Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah .....	21
2.9. Tujuan Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah .....	22



2.10. Metode Pendekatan Pengukuran Kinerja .....	23
2.11. Penelitian Terdahulu .....	28
2.12. Kerangka Pemikiran .....	30
2.13. Hipotesis .....	31
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	 33
3.1. Objek Penelitian .....	33
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian .....	33
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	33
3.4. Definisi Operasional .....	34
3.5. Metode Analisis Data .....	36
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 39
4.1. Keadaan Provinsi Sumatera Barat .....	39
4.1.1. Profil Sumatera Barat .....	39
4.1.2. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .....	41
4.1.3. Visi dan misi Pemerintah Kepulauan Mentawai .....	42
4.1.4. Visi dan Misi Pemerintah Pesisir Selatan .....	43
4.1.5. Visi dan misi Pemerintah Solok .....	43
4.1.6. Visi dan misi Pemerintah Sijunjung .....	44
4.1.7. Visi dan misi Pemerintah Tanah Datar .....	45
4.1.8. Visi dan misi Pemerintah Padang Pariaman .....	46
4.1.9. Visi dan misi Pemerintah Agam .....	47
4.1.10. Visi dan misi Pemerintah Lima Puluh Koto .....	48
4.1.11. Visi dan misi Pemerintah Pasaman .....	49
4.1.12. Visi dan misi Pemerintah Solok Selatan .....	49
4.1.13. Visi dan misi Pemerintah Dharmasraya .....	50
4.1.14. Visi dan misi Pemerintah Pasaman Barat .....	51
 4.2. Statistik Descriptive .....	 52
4.3. Uji Asumsi Klasik .....	53

4.3.1. Uji Normalitas .....	53
4.3.2. Uji Multikolinearitas .....	54
4.3.3. Uji Heteroskedastisitas .....	55
4.3.4. Uji Autokorelasi .....	56
4.4. Uji Hipotesis .....	57
4.4.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan .....	57
4.4.2. Pengaruh Retribusi Daerah Kinerja Keuangan .....	58
4.4.3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan .....	59
4.4.4. Pengaruh Lain-lain PAD Yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan ..	60
4.4.5. Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan .....	61
4.4.6. Koefisien Determinasi .....	63
 BAB V PENUTUP .....	 65
5.1. Kesimpulan .....	65
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	66
5.3. Saran .....	66

## DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR TABEL

Judul Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Descriptive Statistik .....	52
Tabel 4.2 Multikolinearitas .....	55
Tabel 4.3 Autokorelasi .....	57
Tabel 4.4 Nilai T Hitung Pajak Daerah .....	57
Tabel 4.5 Nilai T Hitung Retribusi Daerah .....	58
Tabel 4.6 Nilai T Hitung Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah .....	59
Tabel 4.7 Nilai T Hitung Lain-lain PAD Yang Sah .....	60
Tabel 4.8 Nilai F Hitung PAD .....	61
Tabel 4.9 Persamaan Regresi .....	62
Tabel 4.10 R Square .....	63

## DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	31
Gambar 4.1 Normalitas P-Plot .....	54
Gambar 4.2 Scatterplot .....	56

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. LATAR BELAKANG**

Memasuki era reformasi yang ditandai oleh bangkitnya demokrasi, dimana negara menjadi titik sentral yang menentukan gerak kehidupan daerah telah berakhir. Sebagai implemementasi dari era reformasi tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, yaitu memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan prakarsa dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyediakan pelayanan publik demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.



Selanjutnya dalam pasal 156 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itulah, perlu kecakapan yang tinggi bagi pimpinan daerah agar pengelolaan dan terutama alokasi dari keuangan daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta dapat membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sebagai implementasi dari kewenangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak dan Retribusi Daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakan setiap daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

Tujuan kebijakan desentralisasi yang diambil pemerintahan pusat adalah : (1) Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, (2) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintahan pusat, (3) Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah ini memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan menggali sumber pendapatannya sendiri. Pembiayaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat

diandalkan. Sumber pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah: (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, (b) Dana Perimbangan, (c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. PAD memberikan gambaran mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan. Sehingga pemerintah benar-benar mengoptimalkan penerimaan PAD.

Pajak daerah adalah sumber penerimaan terbesar bagi PAD. Menurut Prakosa (2003:2), pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, dan Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek yang belum dikenakan oleh negara (pusat). Sebaliknya negara juga tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Sumatera Barat”**

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah Pajak Daerah mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah Retribusi Daerah mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat?
4. Apakah Pendapatan lain-lain Yang Sah mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat?
5. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat?



### **I.3. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pada tahun data penelitian. Dimana tahun yang digunakan antara tahun 2008 sampai tahun 2012. Disebabkan oleh sulitnya memperoleh data realisasi PAD pada tahun 2013.

### **I.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini, antara lain:.

1. Untuk menganalisa pengaruh Pajak Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2008-2012.
2. Untuk menganalisa pengaruh Retribusi Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2008-2012.
3. Untuk menganalisa pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2008-2012.
4. Untuk menganalisa pengaruh Pendapatan Lain-Lain Yang Sah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2008-2012.
5. Untuk menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2008-2012

### **I.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

#### **1. Instansi pemerintahan**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

#### **2. Ilmu pengetahuan**

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kinerja keuangan daerah.

#### **3. Peneliti selanjutnya.**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Otonomi Daerah**

Otonomi daerah berasal dari kata “autonomy” dimana “auto” artinya sedia dan “nomy” artinya aturan atau undang-undang, jadi autonomy artinya hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri atas inisiatif sendiri dan kemampuan sendiri dimana hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tujuan otonomi daerah menurut Kuncoro (2007) dibedakan dari dua sisi kepentingan yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat sedikitnya ada 4 (empat) tujuan utama dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu

- a. Pendidikan politik
- b. Pelatihan kepemimpinan
- c. Menciptakan stabilitas politik
- d. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.



Dan lebih jauh lagi, tujuan utama dari konsep desentralisasi dan otonomi daerah dengan tidak hanya membatasinya pada konteks hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, maka semuanya bermuara pada pengaturan mekanisme hubungan antara Negara dan masyarakat. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi baik pada proses pengambilan keputusan di daerah maupun di dalam pelaksanaannya. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik sesuai tuntutan masyarakat daerah, mendorong efisiensi alokatif penggunaan dana pemerintah melalui desentralisasi kewenangan dan pemberdayaan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka konsep otonomi yang diterapkan adalah :

- a. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah pusat dalam hubungan domestik kepada pemerintah daerah, Kecuali untuk bidang politik luar negeri, pertahanan, keagamaan, serta bidang keuangan dan moneter. Dalam konteks ini, pemerintah daerah terbagi atas dua ruang lingkup, yaitu daerah kabupaten dan kota, dan propinsi
- b. Penguatan peran daripada sebagai representasi rakyat
- c. Peningkatan efektifitas fungsi pelayanan melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki, serta lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
- d. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan daerah. Pembagian

pendapatan dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi.

Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah serta pemberian keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.

## **2.2. Tujuan Otonomi Daerah**

Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 disebutkan *tujuan otonomi daerah* sebagai berikut:

Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut disebutkan adanya 3 (tiga) tujuan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau

kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.3. Pendapatan Asli Daerah**

Menyingkapi dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang setiap tahun meningkat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung percepatan pelaksanaan dan perwujudan otonomi daerah khususnya dibidang pendapatan daerah. Oleh karenanya kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah akan dapat diukur berdasarkan penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun dan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang menganut prinsip (1) Potensial artinya lebih menitik beratkan pada potensinya dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak, (2) Tidak memberatkan masyarakat, (3) Tidak merusak lingkungan (4) Mudah diterapkan/diaplikasikan, mudah dilaksanakan, (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif dan materinya.

Pendapatan daerah merupakan pos penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan juga merupakan tolak ukur berhasilnya suatu perusahaan atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pendapatan daerah yang berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode tertentu menjadi hak daerah, setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing



dengan mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk menggerakkan pembangunan daerah, terutama melalui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala potensi yang ada pada daerah tersebut dan sifatnya dapat dipaksakan karena adanya peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.3.1. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

#### **1. Hasil Pajak Daerah**

Hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pungutan daerah

menurut peraturan yang ditetapkan tersebut digunakan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

## **2. Hasil Retribusi Daerah**

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 64 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

## **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah**

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas

daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan. Sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

#### **4. Lain Lain PAD Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **2.3.2. Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta

Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

### **2.3.3. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dalam hal ini segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor



Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Pajak Penghasilan;
- c. PPN;
- d. PPn BM.

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota, dimana untuk urusan administrasi yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau Unit Pelayanan Teknis Daerah yang dibawahhi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan;
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### **2.3.4. Manfaat Pajak**

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas

atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

#### **2.4. Teori Anggaran**

Menurut Glen A. Welsch dalam bukunya berjudul *Budgeting* menyebutkan bahwa anggaran merupakan suatu bentuk statement daripada rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk/blue print dalam periode itu. Beberapa fungsi anggaran, yaitu : (1) Sebagai instrumen politik, artinya anggaran merupakan salah satu instrument formal yang mewujudkan *bargaining eksekutif* dengan

tuntutan kebutuhan publik yang diwakili oleh legislative, (2) Instrumen Kebijakan Fiskal. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memberikan fasilitas, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya, (3) Instrumen Perencanaan. Anggaran menyebutkan tujuan yang ingin dicapai, biaya, dan hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan pada masing-masing unit kerja, (4)instrumen Pengendalian. Anggaran berisi rencana penerimaan dan pengeluaran secara rinci setiap unit kerja, sehingga unit kerja tidak melakukan *overspending*, *underspending*, atau mengalokasikan anggaran pada bidang yang lain.

## **2.5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD/N merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja, dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan. Dibidang pengelolaan pendapatan



daerah akan terus diarahkan pada peningkatan PAD. Untuk merealisasikan hal tersebut akan dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun menggali sumber-sumber baru.

## **2.6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2008: 230). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2008: 231-232). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

## **2.7. Pengukuran Kinerja dan Peningkatan Kinerja**

Pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja akan memberitahu kita apa yang telah terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan. Suatu organisasi harus menggunakan pengukuran kinerja secara efektif agar dapat mengidentifikasi strategi dan perubahan operasional apa yang dibutuhkan serta proses yang diperlukan dalam perubahan tersebut.

Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Usulan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran yang lebih formal.

Anggaran daerah (dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah/ APBD) adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya selama satu tahun anggaran. Dalam konteks pengukuran kinerja berbasis anggaran, tidak bisa dilepaskan pemahaman kita terhadap 3 (tiga) siklus utama pengelolaan keuangan daerah, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan dan (3) pengawasan/pengendalian.

Ketiga proses tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya karena ketiganya merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah. Fokus pengukuran kinerja berbasis anggaran sebenarnya adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah, yaitu sejauh mana efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

## **2.8. Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah**

Ukuran kinerja dan indikator kinerja merupakan dua istilah yang berbeda. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan dan misi instansi pemerintah. Sistem pengukuran kinerja dapat membantu pengelola dalam memonitor implementasi strategi organisasi dengan cara membandingkan antara hasil/*output actual* dengan sasaran dan tujuan strategi.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap laporan keuangan daerah perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam laporan keuangan daerah berbeda dengan laporan keuangan perusahaan swasta (Ihyaul Ulum, 2009)

## **2.9. Tujuan Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah**

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah :

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
- c. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional .

Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:

- 1) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
- 2) Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2004:121).



Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah

Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

## **2.10. Metode Pendekatan Pengukuran Kinerja**

### **1. Analisis Laporan Keuangan Daerah**

Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Adapun rasio-rasio yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

### **A. Rasio Kemandirian**

Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\frac{\text{Pendapatan Asli daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}}$$

### **B. Rasio Upaya Fiskal**

Bagian ini akan mengukur tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah

$$\frac{\text{Total Pendapatan asli daerah (PAD)}}{\text{Total Anggaran Asli Daerah}}$$

Semakin tinggi hasil rasionya, akan semakin terlihat bahwa upaya pemerintah daerah semakin lebih baik dan ada perencanaan yang baik dalam mengelola pendapatan

### **C. Rasio Desentralisasi Fiskal**

Ukuran ini menunjukan kemenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Dalam metode pendekatan pengukuran kinerja keuangan pada Analisis Laporan Keuangan Daerah yang digunakan ialah *Rasio Desentralisasi Fiskal*.

## **2. Analisis Anggaran**

Data utama yang digunakan dalam analisis ini adalah anggaran (APBD) dan laporan realisasi anggaran. Data anggaran memuat rencana-rencana penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam satu periode. Data laporan realisasi anggaran memuat realisasi penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam satu periode

### 3. Balance Scorecard Method

Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk mengevaluasi apakah strategi perusahaan telah dijalankan dengan baik melalui program-programnya secara 'Cascading down' dari level strategis sampai ke level operasional. **Balanced scorecard** merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk mensinkronkan program dan kegiatan perusahaan dengan visi dan strategi organisasi, meningkatkan komunikasi internal dan eksternal dan memantau kinerja organisasi. Pada prinsipnya, *Balanced Scorecard* adalah konsep yang merupakan penerjemahan strategi dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka panjang, yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan.

Metode Balanced Score Card menyediakan metode pengukuran kinerja yang mengkombinasikan pengukuran tradisional yang menggunakan parameter finansial dengan pengukuran yang bersifat non-finansial secara seimbang, dengan menggunakan empat perspektif, yaitu : perspektif finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran.

### 4. Pengukuran Value For Money

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus



mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa output yang berwujud (tangible output), tetapi kebanyakan juga bersifat output tidak berwujud (intangible output). Ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan indikator kinerja. Perbedaan antara ukuran kinerja dengan indikator kinerja adalah:

- Ukuran kinerja, Umumnya mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, misalnya: laporan keuangan pemerintah.
- Indikator kinerja, Mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Mekanisme penentuan indikator kinerja membutuhkan:

- a. Sistem perencanaan dan pengendalian. Meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan keseluruhan bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando.
- b. Spesifikasi teknis dan standarisasi. Spesifikasi ini digunakan sebagai ukuran kinerja kegiatan, program dan organisasi.

- c. Kompetensi teknis dan profesionalisme. Personil yang memiliki kompetensi dan professional merupakan jaminan dukungan dalam pekerjaan.
- d. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian reward dan punishment yang bersifat finansial.
- e. Sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya. Mekanisme ini digunakan untuk memperbaiki kinerja personil dan organisasi.

## **2.11. Penelitian Terdahulu**

- 1 . Eriadi (2004) juga telah meneliti tentang perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah otonomi daerah ini menyimpulkan :
  - Analisa Data yang dilakukan menunjukkan bahwa regulasi keuangan tidak secara keseluruhan memperbaiki rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dijelaskan dari hasil penelitian bahwa dari empat rasio kinerja mengalami perbedaan antara sebelum dan setelah otonomi daerah yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio upaya fiskal, rasio kemampuan pembiayaan dan rasio efesiensi, diantaranya dua rasio berkembang positif berupaya kenaikan rata-rata kinerja yaitu

rasio upaya fiskal dan rasio efesiensi, sisanya dua rasio berkembang negative berupa penurunan kinerja yang signifikan setelah otonomi yaitu rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemampuan pembiayaan.

- Sebanyak tiga rasio kinerja keuangan yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio kemampuan pembiayaan dan rasio efesiensi anggaran tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam periode sebelum dan sesudah otonomi.

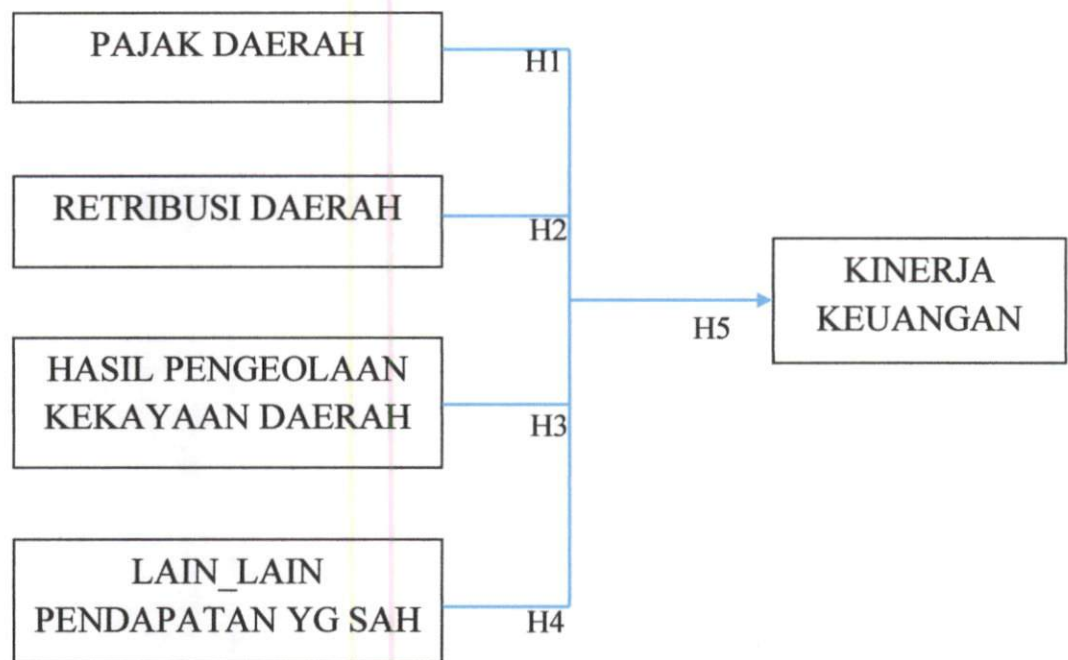
2. Kardawati (2007) meneliti tentang “Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Sukoharjo”. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mengatakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja anggaran keuangan Pemerintah Daerah Sukoharjo dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun 2005. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif dengan menggunakan alat analisis yaitu teknik pengukuran value for money (ekonomi, efesiensi, dan efektivitas) dan rasio kinerja (rasio kemandirian daerah, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio retribusi daerah terhadap PAD, rasio belanja aparatur daerah terhadap total belanja dan rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja)

3. Yanti (2011) meneliti tentang analisis rasio sebagai indikator kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa analisis rasio untuk mengukur indikator kinerja keuangan daerah, seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas (rasio keserasian), *debt service coverage ratio (DSCR)*, dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemda Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat dapat dikatakan memiliki kinerja yang positif

#### **2.12. Kerangka Pemikiran**

Kinerja keuangan daerah adalah Kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalian kekayaan asli daerah atau PAD harus terus dipacu pertumbuhannya karena kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini akan sangat berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Kinerja ini dapat dilihat melalui sasaran yang telah tercapai dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan PAD (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan dan kekayaan daerah, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah). Berikut hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut.





Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Hubungan Antar Variabel Penelitian

### 2.13. Hipotesis

H1: Pajak Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

H2: Retribusi Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

H3: Laba Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

H4: Pendapatan Lain-Lain yang Sah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

H5: Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **3.1. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah semua Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2008-2012.

##### **3.2. Populasi Dan Sampel Penelitian**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bentuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2008 sampai 2012.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintahan. pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain penerimaan yang sah sebagai variabel bebas dan kinerja keuangan sebagai variabel tidak bebas.

##### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemda Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2008-2012 serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian (*field research*) pada instansi Pemda Kota atau Kabupaten di Provinsi Sumatera barat.
- b. Data sekunder, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan keuangan seperti realisasi PAD, realisasi pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain yang sah dan bukan pajak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

### **3.4. Definisi Operasional**

#### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

##### **a. Pajak Daerah**

Adalah sumber penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pajak dan peraturan Daerah yang berlaku.



**b. Retribusi Daerah**

Restribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Adalah hasil yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dari hasil penyertaan modal.

**d. Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Penerimaan lain-lain yang yaitu penerimaan bukan pajak dan restribusi yang berasal dari hasil penjualan milik daerah, jasa giro, sumbangan pihak ketiga, penerimaan ganti rugi atas pembayaran daerah.

**2. Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

### 3.5. Metode Analisis Data

#### 1. Pengujian asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng (*bell shaped*).

##### b. Uji Multikolinearitas

pengujian yang dilakukan untuk melihat adanya *multikolinieritas* yang merupakan pelanggaran dalam asumsi klasik. *multikolinieritas* maksudnya tidak boleh terjadi hubungan antar variable bebas (*independent*)

##### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scarplot.s*

##### d. Uji Autokorelasi

pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antarvariabel bebas dalam penelitian. Untuk mengetahui ada tidaknya *autokorelasi*, dapat dilihat dari nilai *Durbin – Watsontest*. Apabila nilai *Durbin – Watson test* mendekati nilai 2, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi *autokorelasi* pada variabel bebas.

## 2. Analisis Regresi Berganda

Regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + \varphi$$

Dimana :

Y = Kinerja keuangan

$\alpha$  = Konstanta

b = koefisien

$x_1$  = Pajak Daerah

$x_2$  = Retribusi Daerah

$x_3$  = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

$x_4$  = Lain lain PAD yg sah

## 3. Pengujian Hipotesis

### 1. Pengujian arti keseluruhan regresi (Uji F)

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 17.

### 2. Pengujian Koefisien regresi parsial (Uji t)

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial atau individu terhadap variabel tidak bebas dengan asumsi variabel yang

lain konstan. Pengujian ini dilakukan dengan melihat derajat signifikansi masing-masing variabel bebas menggunakan SPSS.

### 3. Koefisien Determinasi

Besarnya koefisien determinasi  $(R)^2$  adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi atau persamaan regresi semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen. Besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial dilihat dari besarnya determinasi parsial  $(r)^2$ .



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Keadaan Provinsi Sumatera Barat**

##### **4.1.1. Profil Sumatera Barat**

Provinsi Sumatera Barat, tempat bermukimnya masyarakat Minangkabau dan tidak berlebihan disebut surga yang terakhir. Provinsi ini dikaruniai dengan budaya dan keindahan alamnya yang sulit dicarikan tandingannya. Tidak mengherankan kalau Sumatera Barat telah lama dikenal sebagai daerah tujuan wisata bagi wisatawan. Perjalanan ke Bukittinggi, suatu daerah yang beriklim sejuk dikelilingi oleh gunung gunung dengan nagari nagari tradisional serta tatanan kehidupan yang masih bertahan selama berabad abad. Atau berkunjung ke Padang menelusuri ibukota provinsi dengan masakan Padang yang terkenal sampai ke mancanegara, dan perjalanan ke daerah daerah cagar alam.

Sumatera Barat terletak antara 0o 54 Lintang Utara dan 3o 30 Lintang Selatan serta 98o 36 dan 101o 53 Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara disebelah Utara, Provinsi Jambi disebelah Selatan, Provinsi Riau disebelah Timur, dan Samudera Indonesia disebelah Barat. Kondisi alam Sumatera Barat sampai saat ini masih diliputi oleh kawasan lindung yang mencapai 45,17% dari luas keseluruhan. Daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat di hampir semua kabupaten dan

kota. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 meter dari permukaan laut yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat.

Provinsi Sumatera Barat secara administratif terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota, dengan ibukotanya adalah Kota Padang. Provinsi ini memiliki luas daerah sekitar 42,2 ribu Km<sup>2</sup> (2,20% dari luas wilayah Republik Indonesia). Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu Km<sup>2</sup>, sedangkan Kota Padang Panjang memiliki luas daerah terkecil, yakni 23 Km<sup>2</sup>.

Struktur ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2008 didominasi oleh sektor Pertanian (30%), Perdagangan (18%) dan Jasa (16%). Untuk sektor pertanian kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan memberi persentase terbesar dengan 50%, kemudian sub sektor tanaman perkebunan sebesar 25%, diikuti oleh sub sektor perikanan, peternakan dan kehutanan masing masing memberikan sebesar 11%, 8% dan 6%. Sementara dari sektor perdagangan kontribusi terbesar datang dari sub sektor perdagangan besar dan eceran dengan 96%, kemudian sub sektor restoran dan hotel masing masing dengan 3% dan 1%.

Provinsi Sumatera Barat mempunyai komoditi unggulan disektor pertanian, pertambangan dan jasa. Untuk sektor pertanian komoditi yang diunggulkan adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi gambir, jarak dan nilam. Sub sektor perikanan dengan

komoditi yang diunggulkan yaitu perikanan tangkap. Sementara komoditi penunjang untuk sektor pertanian yaitu sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi kakao, kelapa dan karet. sub sektor perikanan meliputi budidaya tambak, budidaya kolam dan budidaya keramba. Untuk sektor pertambangan komoditi yang diunggulkan adalah semen. Sedangkan sektor jasa komoditi yang diunggulkan yaitu bidang pariwisata dengan salah satu obyek wisata yang terkenal Wilayah Bukittinggi.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, Provinsi Sumatera Barat memiliki berbagai sarana, untuk transportasi laut, provinsi ini didukung 8 (delapan) pelabuhan laut yang terdiri dari 1 (satu) pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Teluk Bayur dan 7 (tujuh) pelabuhan khusus penyeberangan diantaranya Pelabuhan Siuban, Bake, Air Bangis, Tua Pejat. Selain itu juga tersedia 2 (dua) bandara utama yaitu Bandara Rokot yang terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawi dan Bandara Tabing di Kota Padang yang melayani penerbangan domestik dan internasional.

#### **4.1.2. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

**Visi Provinsi Sumatera Barat** adalah *“Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional Melalui Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Guna Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Yang Akuntabel”*

**Misi Provinsi Sumatera barat** adalah sebagai berikut :

- 1 Melakukan perubahan budaya dan pola pikir birokrat agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakamuran.
- 2 Menciptakan sistem dan mekanisme pemerintahan yang menjaminakuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan serta mencegah terjadinya korupsi dalam birokrasi.
- 3 Membetuk sistem pemerintahan yang memungkinkan partisipasi dan kontrol masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan.

#### **4.1.3. Visi dan Misi Pemerintah Kepulauan Mentawai**

Visi Pemerintah Kepulauan Mentawai adalah “ *Terwujudnya Masyarakat Kepulauan Mentawai yang Maju, Sejahtera dan Berkualitas*”

**Misi Pemerintah Kepulauan Mentawai** adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan yang harmonis dan berbasis sosial budaya
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Mewujudkan SDM yang cerdas, sehat dan berkualitas.



4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berdaya asing, bercirikan wilayah kepulauan dan berbasis kerakyatan.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

#### **4.1.4. Visi dan Misi Pemerintah Pesisir Selatan**

**Visi Pemerintah Pesisir Selatan** adalah “ *Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Sejahtera* ”.

**Misi Pemerintah Pesisir Selatan** adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan Ekonomi.
2. Melanjutkan pembangunan Pendidikan.
3. Melanjutkan pembangunan Kesehatan.
4. Melanjutkan pembangunan Keagamaan, kepemudaan dan sosial budaya.
5. Melanjutkan Revitalisasi Pemerintah Daerah.

#### **4.1.5. Visi dan Misi Pemerintah Solok**

**Visi Pemerintah Solok** adalah “ *Terwujudnya Pemerintahan yang Baik Menuju Masyarakat Sejahtera* ”.

**Misi Pemerintah Solok** adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata kelola Pemerintah lokal yang baik dan bersih.
2. Meningkatkan kehidupan yang agamais, bermoral dan berbudaya.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan tatanan perekonomian terpadu berbasis teknologi.
4. Menciptakan pendidikan berkualitas.
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan disegala bidang.
7. Membangun kepariwisataan sebagai kekuatan ekonomi strategis.
8. Mengoptimalkan pembangunan kepemudaan, olahraga dan pemberdayaan permepuan.

#### **4.1.6. Visi dan Misi Pemerintah Sijunjung**

**Visi Pemerintah Sijunjung** adalah “ *Terwujudnya Nagari yang Madani Melalui Penguatan Sistim Ekonomi, Percepatan Pengembangan Kualitas SDM dan Lembaga Daerah serta Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Dasar* “.

**Misi Pemerintah Sijunjung** adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penataan dan penguatan ekonomi masyarakat.

2. Meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan kesehatan serta IMTAQ SDM anak nagari.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta prasarana dasar negeri.
4. Memefaanfaatkan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung.
5. Mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan.
6. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil dan peduli dan berwibawa.
7. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dan
8. Revitalisasi adat dan seni budaya anak nagari.

#### **4.1.7. Visi dan Misi Pemerintah Tanah Datar**

**Visi Pemerintah Tanah Datar** adalah “ *Tanah Datar Sebagai Pusat Budaya Minangkabau yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan* ”.

**Misi Pemerintah Tanah Datar** adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau baik secara lokal, nasional, maupun International.
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi.
3. Mewujudkan masyarakat yang terdepan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya pada masanya.

4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
5. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan serta mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
6. Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan.
7. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.

#### **4.1.8. Visi dan Misi Pemerintah Padang Pariaman**

**Visi Pemerintah Padang Pariaman** adalah “ *Menjadi Kabupaten Unggul Dalam Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Cerdas dan Sejahtera* “.

**Misi Pemerintah Padang Pariaman** adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berkualitas berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi mutu berbasiskan sinergisitas anatar pemerintah dan masyarakat.
3. Mewujudkan sumber daya yang berkualitas dan berkepribadian wira usaha.
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasiskan sistem agribisnis dan agroindustri.



5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

#### **4.1.9. Visi dan Misi Pemerintah Agama**

**Visi Pemerintah Agama** adalah “ *Mewujudkan Kabupaten Agama yang Agamais, Lestari Adil, Mandiri dan Indah (Alami) Dalam Rangka Memperkokoh Landasan Mencapai Agama yang Mandiri, Berprestasi yang Madani* “.

**Misi Pemerintah Agama** adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
2. Mewujudkan masyarakat yang Agamais dan Beradat.
3. Mewujudkan kemandirian sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Mewujudkan kemajuan daerah dan keseimbangan pembangunan antar kawasan dan wilayah.
5. Mewujudkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan ramah bencana.

#### **4.1.10. Visi dan Misi Pemerintah Lima Puluh Koto**

**Visi Pemerintah Lima Puluh Koto** adalah “ *Terwujudnya Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima Puluh Koto yang Bernuansa Adat Basandi Syarak, Syara Basandi Kitabullah Dama Negara Kesatuan Republik Indonesia* “.

**Misi Pemerintah Lima Puluh Koto** adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, menghargai HAM, penegakan hukum yang berkeadilan dengan pengamalan Pancasila sebagai ideologi Negara.
3. Mewujudkan Nagari yang berbasis adat dan syarat.
4. Mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup.
6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil dengan investasi yang kondusif.
7. Mewujudkan masyarakat yang cinta pendidikan.
8. Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat.

#### **4.1.11. Visi dan Misi Pemerintah Pasaman**

**Visi Pemerintah Pasaman** adalah “ *Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman yang Maju dan Berkeadilan* “.

**Misi Pemerintah Pasaman** adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup beragama dan kualitas pendidikan sumber daya manusia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. Menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik dan bersih
3. Menegakkan supremasi hukum dan meningkatkan pelayanan umum serta bebas dari kkn.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, serta mengelola sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan keharmonisan dan kerja sama dalam tahta kehidupan sosial budaya masyarakat dengan prinsip keadilan dan kebersamaan.

#### **4.1.12. Visi dan Misi Pemerintah Solok Selatan**

**Visi Pemerintah Solok Selatan** adalah “ *Terwujudnya Masyarakat Solok Selatan Sejahtera dan Bertakwa Melalui Percepatan Pengembangan Kualitas SDM, Sistem Ekonomi Kerakyatan serta Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Dasar* “.

**Misi Pemerintah Solok Selatan** sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan pengamalan ajaran Agama bagi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan dan martabat masyarakat.
3. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
4. Menumbuhkembangkan kehidupan sosial dan budaya.
5. Meningkatkan supermasi hukum dan kesadaran politik masyarakat serta tatakelola pemerintah yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar.

#### **4.1.13. Visi dan Misi Pemerintah Dharmasraya**

**Visi Pemerintah Dharmasraya** adalah “ *Mewujudkan Masyarakat Dharmasraya Yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya, Adil dan Sejahtera* “.

**Misi Pemerintah Dharmasraya** adalah sebagai berikut :

1. Menata, mengembangkan dan menyelenggarakan manajemen pemerintah daerah yang responsive, akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan profesional.



2. Membangun Sumber Daya Manusia yang handal dan mampu menguasai IPTEK melalui peningkatan mutu pelayanan pendidikan berdasarkan iman dan taqwa pada Allah SWT.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial, ekonomi dan budaya yang berbasis kerakyatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna pengembangan potensi dan sumber daya daerah.
6. Mengembangkan pariwisata yang bernuansa historis, kultural dan agamis.
7. Mengembangkan ekonomi daerah yang berbasis pertanian, perternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menuju agribisnis dan agroindustri.
8. Meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum melalui penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan.

#### **4.1.14. Visi dan Misi Pemerintah Pasaman Barat**

**Visi Pemerintah Pasaman Barat** adalah “ *Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Manusia* “.

**Misi Pemerintah Pasaman Barat** adalah sebagai berikut :

1. Menumbuh kembangkan budaya yang elok di masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kualitas pendidikan sumber daya manusia.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, serta mengelola sumber daya alam secara optimal.
4. Meningkatkan keharmonisan dan kerja sama dala tata kehidupan sosial budaya masyarakat.

#### 4.2. Statistik Deskriptif

**TABEL 4.1 : Statistik Deskriptif**

Model	Mean	Std. Deviation	N	MAX	MIN
Kinerja keuangan	.04435333	.018378013	60	13%	1%
Pajak Daerah	4.66E6	2772638.065	60	13.267.033	0
Retribusi daerah	5.91E6	6708864.454	60	51.799.557	0
HP kekayaan daerah	4.96E6	4996560.189	60	22.387.583	0
Lain Lain PAD yang sah	1.14E7	4662922.178	60	22.998.414	1.351.807

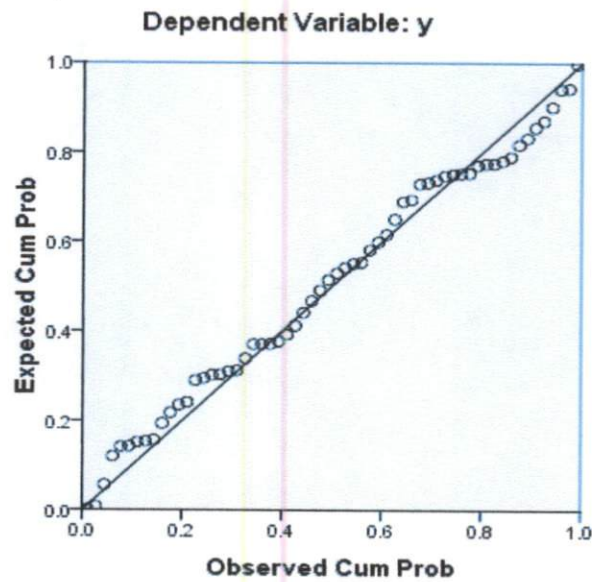
Dari Tabel 4.1 diatas dapat dilihat banyak data yang digunakan 60, dengan nilai maksimum kinerja keuangan 13 % pada daerah Kabupaten Pasaman tahun 2010 dan minimum 1% pada Kabupataen Padang Pariaman 2008. Pajak daerah dengan angka maksimum 13.267.033 pada Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2012 dan minimum 0 pada Kabupaten Mentawai 2012. Retribusi Daerah nilai maksimum 51.799.557 pada daerah Kabupaten Pasaman tahun 2010 dan nilai minimum 0 pada Kabupaten Mentawai tahun 2012. Hasil Perolehan Kekayaan Daerah nilai maksimum 22.387.583 pada daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 dan nilai minimum 0 Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008. Lain-lain PAD yang Sah nilai maksimum 22.998.414 pada daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 dan nilai minimum 1.351.807 Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010.

#### **4.3. Uji asumsi klasik**

##### **4.3.1. Uji Normalitas**

Dari gambar 4.1 di bawah dapat dilihat pencaran data penelitian telah berada di sekitar garis lurus melintang. Tidak ada pencaran data yang terlalu menyimpang jauh dari garis melintang. Dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian telah terdistribusi secara normal.

### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



GAMBAR 4.1 : Normalitas P-P Plot

#### 4.3.2. Uji Multikolinearitas

Perhitungan nilai pada tabel 4.2 di bawah dalam kolom *tolerance* menunjukkan nilai  $>0,10$  dan perhitungan VIF juga bernilai  $<10$  berarti tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen.

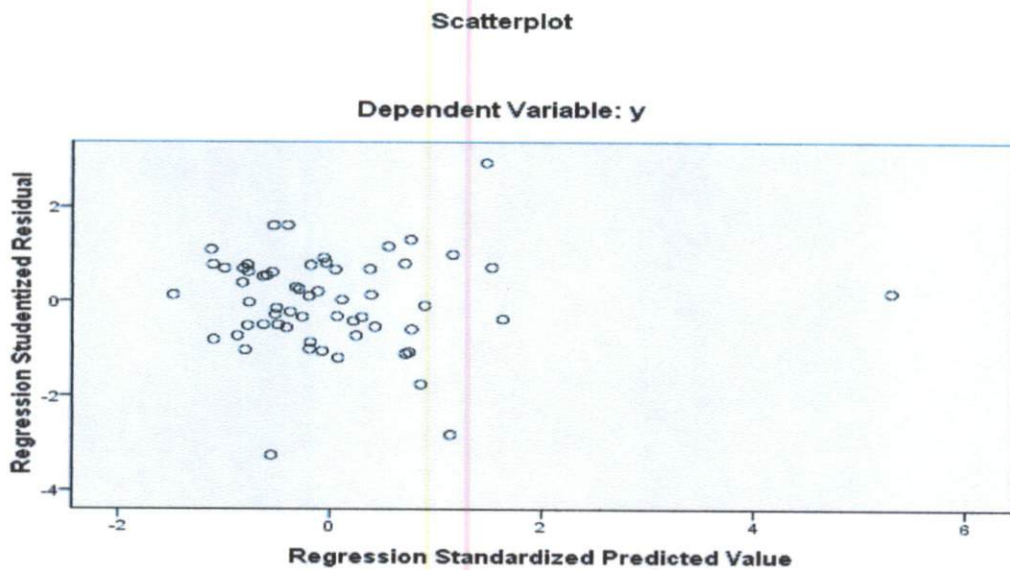


**TABEL 4.2 : Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
Pajak daerah	-2.977E-10	.000	-.045	-.827	.412	.963	1.039
Retribusi daerah	2.197E-9	.000	.802	14.712	.000	.956	1.046
HP kekayaan daerah	1.025E-9	.000	.279	4.270	.000	.668	1.498
Lain lain PAD yg sah	1.531E-9	.000	.388	5.956	.000	.668	1.497

#### 4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Titik titik garis *scatterplot* pada gambar 4.2 dibawah menunjukkan data menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, juga tidak ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk satu pola yang teratur dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.



**GAMBAR 4.2 : Scatterplot**

#### 4.3.4. Uji Autokorelasi

Dari hasil output Tabel 4.3 di bawah dapat dilihat pada kolom Durbin-Watson sebesar 1,113 dan nilai batas Durbin Watson sebesar 0,0075. Nilai 0,0075 dapat dilihat dari tabel Durbin Watson dengan  $n = 60$  dan  $k = 4$  dimana  $K$  adalah banyaknya model variabel prediktor, karena nilai  $0,0075 < 1,113 < (4-1,113)$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

**TABEL 4.3 : Auto Korelasi**

Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.007524209	1.113

#### 4.4. Uji Hipotesis

Untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang diajukan, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis secara keseluruhan PAD dapat menggunakan uji F, sedangkan untuk menguji komponen PAD terhadap kinerja keuangan dapat menggunakan uji T.

##### 4.4.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting bagi pemerintah. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini

**TABEL 4.4 : Nilai T Hitung Pajak Daerah**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Pajak daerah	-2.977E-10	.000	-.045	-.827	.412

Berdasarkan hasil pada tabel 4.4 diatas maka dapat diketahui bahwa H1 ditolak, dimana pajak daerah memberikan koefisien parameter sebesar - 2,977E-10 dengan nilai signifikansi yaitu  $0,412 > 0,05$  maka Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Dalam artian pajak daerah tidak selalu mempengaruhi kinerja keuangan.

#### 4.4.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Retribusi Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang harus diperhatikan oleh pemerintah Daerah. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini.

**TABEL 4.5 : Nilai T Hitung Retribusi Daerah**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Retribusi daerah	2.197E-9	.000	.802	14.712	.000

Berdasarkan hasil pada tabel 4.5 diatas maka dapat diketahui bahwa H2 diterima, dimana retribusi daerah memberikan koefisien parameter sebesar 2,197E-9 dengan nilai signifikansi yaitu  $0,000 < 0,05$  maka Retribusi Daerah



berpengaruh terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

#### 4.4.3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah juga merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini.

**TABEL 4.6 : Nilai T Hitung Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
HP kekayaan daerah	1.025E-9	.000	.279	4.270	.000

Berdasarkan hasil pada tabel 4.6 diatas maka dapat diketahui bahwa H3 diterima, dimana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah memberikan koefisien parameter sebesar 1,025E-9 dengan nilai signifikansi yaitu  $0,000 < 0,05$  maka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

#### 4.4.4. Pengaruh Lain-lain PAD Yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan.

Lain-lain PAD Yang Sah juga merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh Lain-lain PAD Yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini.

**TABEL 4.7 : Nilai T Hitung Lain-Lain PAD yang Sah**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Lain Lain PAD yang Sah	1.531E-9	.000	.388	5.956	.000

Berdasarkan hasil pada tabel 4.7 diatas maka dapat diketahui bahwa H4 diterima, dimana Lain lain PAD yang Sah memberikan koefisien parameter sebesar 1,531E-9 dengan nilai signifikansi yaitu  $0,000 < 0,05$  maka Lain Lain PAD yang Sah berpengaruh terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

#### 4.4.5. Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan

Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini.

**TABEL 4.8 : Nilai Uji F PAD**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.017	4	.004	74.247	.000
Residual	.003	55	.000		
Total	.020	59			

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8 diatas diketahui bahwa H5 diterima, dimana PAD secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan karena F hitung 74.247 dan tingkat signifikansi 0,000 karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

**TABEL 4.9 : Persamaan Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.010	.003		3.160	.003		
Pajak daerah	-2.977E-10	.000	-.045	-.827	.412	.963	1.039
Retribusi daerah	2.197E-9	.000	.802	14.712	.000	.956	1.046
HP kekayaan daerah	1.025E-9	.000	.279	4.270	.000	.668	1.498
Lain lain PAD yang sah	1.531E-9	.000	.388	5.956	.000	.668	1.497

Dari keempat variabel independent yang dimasukkan ke dalam model regresi variabel Pajak Daerah tidak signifikan hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi di atas 0.05. sedangkan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah di bawah 0.05. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan dipengaruhi oleh Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah dengan Persamaan Regresi sebagai berikut :

$$Y = 0.010 - 2,977E-10 X_1 + 2,197E-9 X_2 + 1,025E-9 X_3 + 1,531E-9 X_4$$

**Penjelasan :**



- Konstanta sebesar 0,010 menunjukkan apabila tidak ada variabel independen, maka kinerja keuangan sebesar 0,010
- B2 sebesar 2,197E-9 menunjukkan bahwa setiap kenaikan retribusi daerah sebesar 1% akan diikuti dengan kenaikan kinerja sebesar 2,197E-9 dengan asumsi variabel lain tetap
- B3 sebesar 1,025E-9 menunjukkan bahwa setiap kenaikan HP kekayaan daerah sebesar 1% akan diikuti dengan kenaikan kinerja sebesar 1,025E-9 dengan asumsi variabel lain tetap
- B4 sebesar 1,531E-9 menunjukkan bahwa setiap kenaikan lain lain PAD yg sah sebesar 1% akan diikuti dengan kenaikan kinerja sebesar 1,531E-9 dengan asumsi variabel lain tetap

#### 4.4.6. Koefisiensi Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen dari model yang dibangun.

**TABEL 4.10 : R Square**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.919	.844	.832	.007524209	1.113

Pada tabel 4.10 diatas menunjukan bahwa koefisien determinasi mempunyai nilai  $R^2 = 0,844$ . Hal ini berarti 84,4% variabel dependen kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh keragaman variabel independen (PAD) dan 15,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model atau 83,2% secara simultan PAD mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini :

1. Pengujian menunjukan Pajak Daerah tidak dominan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
2. Pengujian menunjukan Retribusi Daerah dominan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
3. Pengujian menunjukan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dominan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat
4. Pengujian menunjukan Lain-lain PAD Yang Sah dominan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat
5. Pengujian serempak menunjukan bahwa terdapat pengaruh PAD secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan prinsip prinsip otonomi daerah yang sangat dituntut bahwa belanja pembangunan juga seharusnya dapat dibiayai oleh PAD dan PAD merupakan sumber pembiayaan daerah yang utama dalam pelaksanaan desentralisasi.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

1. Adanya perubahan – perubahan peraturan Daerah sehingga alat ukur untuk masing masing komponen berubah.
2. Dari 12 Kabupaten yang di teliti ada potensi yang tidak sama sehingga menjadi kendala dalam informasi.

## **5.3. Saran**

Saran-saran yang dapat disampaikan penulis terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Dalam hal peningkatan PAD, pemerintah Kabupaten Provinsi Sumatera Barat harus berusaha menggali lebih banyak sumber – sumber PAD baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi dan juga secara besamaan harus memperhatikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, juga setiap daerah agar memfilitasi pendirian BUMD, agar meningkatkan kinerja
2. Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat harus berupaya mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat agar otonomi daerah murni dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, dan memaksimalkan pendapatan dari sektor perpajakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bachtiar dan Muchlis, Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi : Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Dora, Detisa. 2009. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Khusus Pada Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- Eriadi. 2004. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah (Suatu Tinjauan Terhadap Perubahan Regulasi Keuangan Daerah)*. Tesis. Medan
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Hessel, Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Analisis Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah Kontemporer*. Jakarta: Lukman Offset.
- Kardawati. 2007. *Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Sukoharjo*. Program Sarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah ( Reformasi. Perencanaan Strategi dan Peluang)*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Pres.
- Ruslina, Nadaek. 2003. *Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi.Akuntansi,FE,Universitas Sanata Dharma.
- Ulum, Ihyaul, 2009. *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Welsch, Glenn A, Ronald W. Hilton, dan Paul N. Gordon. 1995. *Budgeting (Penyusun Anggaran Perusahaan) Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yanti. 2011. *Analisis Rasio Sebagai Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten soppeng*. Makassar. UNHAS
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No 34 Tahun 2000 *tentang pajak dan retribusi daerah* , Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Lampiran 1

Regression Antara PAD dan Kinerja

Coefficients<sup>a</sup>

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.010	.003		3.160	.003		
	x1	-2.977E-10	.000	-.045	-.827	.412	.963	1.039
	x2	2.197E-9	.000	.802	14.712	.000	.956	1.046
	x3	1.025E-9	.000	.279	4.270	.000	.668	1.498
	x4	1.531E-9	.000	.388	5.956	.000	.668	1.497

a. Dependent Variable: y

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.919 <sup>a</sup>	.844	.832	.007524209	1.113

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x2, x3

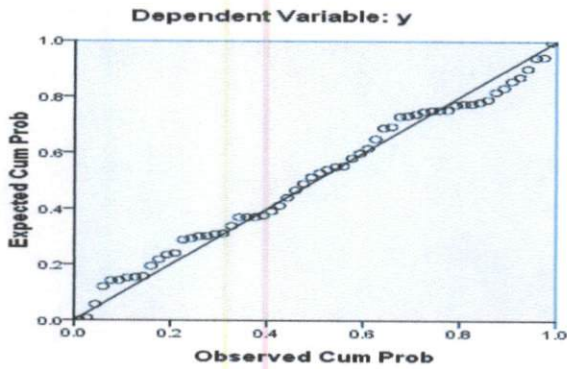
b. Dependent Variable: y

Descriptive Statistics

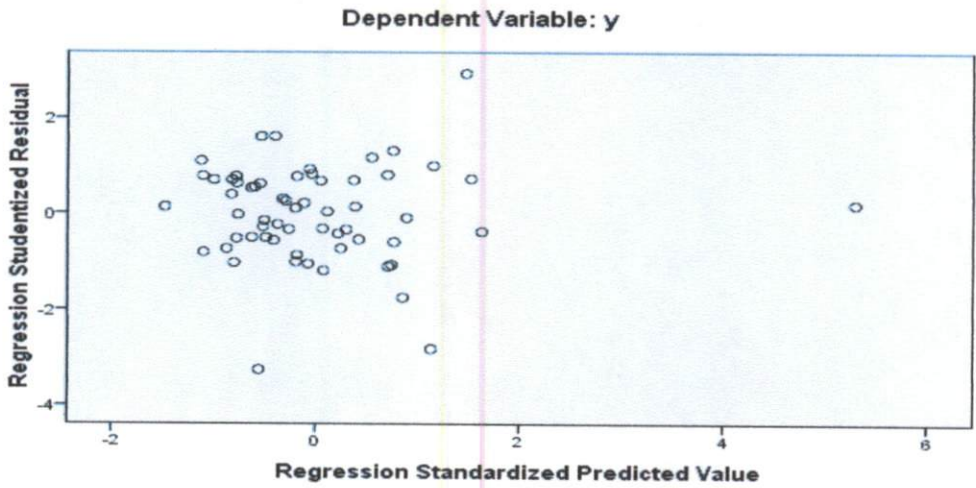
	Mean	Std. Deviation	N
y	.04435333	.018378013	60
x1	4.66E6	2772638.065	60
x2	5.91E6	6708864.454	60
x3	4.96E6	4996560.189	60
x4	1.14E7	4662922.178	60

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.017	4	.004	74.247	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.003	55	.000		
	Total	.020	59			

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot





## Lampiran 2

PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2008 SAMPAI TAHUN 2012

( Dalam 000 )

N O.	KABUPATEN	THN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	HASIL PENGELO LAAN KEKAYA AN DAERAH	LAIN LAIN PAD YANG SAH	<u>TOTAL PAD</u>	DANA PERIMBANGAN	PENDAPATAN LAIN	PEMBIAYAAN DAERAH	<u>TOTAL PENERIMAAN</u>	KINERJA
1	KEPULAUAN MENTAWAI	2008	285.568	2.934.000	7.745.157	17.210.202	28.174.927	322.170.529	51.964.846	168.705.301	542.840.676	5%
		2009	302.935	3.127.301	7.717.621	11.810.000	22.957.857	352.054.421	18.460.504	280.733.668	651.248.593	4%
		2010	737.717	1.970.433	10.161.240	15.484.905	28.354.295	349.720.456	25.142.284	281.308.667	656.171.407	4%
		2011	517.765	2.682.093	18.621.945	15.902.783	37.724.586	381.545.582	36.288.745	223.501.269	641.335.596	6%
		2012	0	0	18.947.340	18.078.345	37.025.685	426.279.223	36.022.934	232.480.620	694.782.777	5%
2	PESISIR SELATAN	2008	4.092.760	3.822.705	1.718.643	6.743.886	16.377.994	520.707.718	110.385.344	48.429.791	679.522.853	2%
		2009	4.007.714	3.762.782	2.146.892	7.597.029	17.514.417	535.961.582	25.865.853	80.611.774	642.439.209	3%
		2010	4.164.985	3.611.805	2.407.706	7.411.434	17.595.930	544.513.285	169.425.277	48.991.690	762.930.252	2%
		2011	6.628.724	4.731.304	3.993.380	14.926.879	30.280.287	619.588.790	141.736.840	60.946.696	822.272.326	4%
		2012	7.026.802	6.482.534	3.747.134	22.998.414	40.254.884	711.834.651	120.211.101	56.146.310	888.192.062	5%
3	SOLOK	2008	3.604.923	4.348.147	2.414.781	8.005.249	18.373.100	443.105.866	21.794.437	46.799.644	511.699.947	4%
		2009	3.693.853	3.839.764	2.532.926	9.739.747	19.806.290	439.362.844	30.311.512	29.424.943	499.099.299	4%
		2010	3.151.114	4.161.798	3.119.450	9.187.960	19.620.322	492.563.810	41.186.297	33.835.365	567.585.472	3%
		2011	5.375.403	4.993.537	5.200.895	15.062.019	30.631.854	555.673.452	75.084.564	51.194.833	681.952.849	4%
		2012	6.233.467	5.911.337	4.857.866	9.676.797	26.679.467	600.756.083	99.554.213	68.189.976	768.500.272	3%
4	SIJUNJUNG	2008	3.077.475	4.601.479	3.562.220	13.182.617	24.423.791	333.592.322	19.215.603	134.691.736	487.499.661	5%
		2009	2.910.592	4.229.506	4.637.762	14.204.410	25.982.270	338.735.910	49.149.417	129.835.616	517.720.943	5%
		2010	2.783.306	3.934.984	5.210.281	10.045.276	21.973.847	347.137.442	69.984.385	119.291.610	536.413.437	4%